KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



Balai P3KP
Sulawesi II

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Tahun 2025-2029** dapat terselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Renstra ini merupakan penjabaran teknis di tingkat satuan kerja atas Rencana Strategis tiap Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di daerah, terutama dalam mengatasi *Backlog* perumahan dan meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fokus kami adalah memastikan setiap alokasi sumber daya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan kerja bagi seluruh staf di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II serta mitra kerja terkait. Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat, memberikan arah yang jelas, dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II.

Pa[illegible]mber 2025
Ke[illegible] Sulawesi II

Ir. Rec[illegible]ahope, S.T., M.T.
NIP. 19710313 200212 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 Kondisi Umum 6
1.2 Potensi dan Permasalahan 36
BAB II TUJUAN DAN SASARAN 45
2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II 45
2.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II 46
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 52
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi 52
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II 55
3.3 Kerangka Kelembagaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II 57
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 64
4.1 Target Kinerja 64
4.2 Kerangka Pendanaan 64
BAB V PENUTUP 66
LAMPIRAN I 68
LAMPIRAN II 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Trend Perumahan Jumlah Rumah, Jumlah RLH dan Jumlah RTLH di Provinsi Sulawesi Tengah 7
Gambar 2 Diagram Sebaran Jumlah RLH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 8
Gambar 3 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat 17
Gambar 4 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 20
Gambar 5 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 21
Gambar 6 Tingkat Kepadatan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024 22
Gambar 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 -2024 24
Gambar 8 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 30
Gambar 9 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 31
Gambar 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 35
Gambar 11 Pohon Kinerja BP3KP Sulawesi II 48
Gambar 12 Diagram SOTK UPT 60
Gambar 13 Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi II 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka Backlog Kepemilikan Rumah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 9
Tabel 2 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 9
Tabel 3 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 10
Tabel 4 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Tengah 11
Tabel 5 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Barat 13
Tabel 6 Target, Realisasi, dan Capaian BP3KP Sulawesi II Tahun 2020-2024 15
Tabel 7 Tingkat Kemiskinan Ekstrim Provinsi Sulawesi Tengah 2021 - 2024 22
Tabel 8 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 33
Tabel 9 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 33
Tabel 10 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 33
Tabel 11 Sasaran Program BP3KP Sulawesi II 49
Tabel 12 Kebutuhan SDM BP3KP Sulawesi II 62
Tabel 13 Kualifikasi Pendidikan SDM BP3KP Sulawesi II 62
Tabel 14 Target Kinerja 64
Tabel 15 Kerangka Pendanaan 65
Tabel 16 Matriks Kinerja Pendanaan 68
Tabel 17 Metode Perhitungan 71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

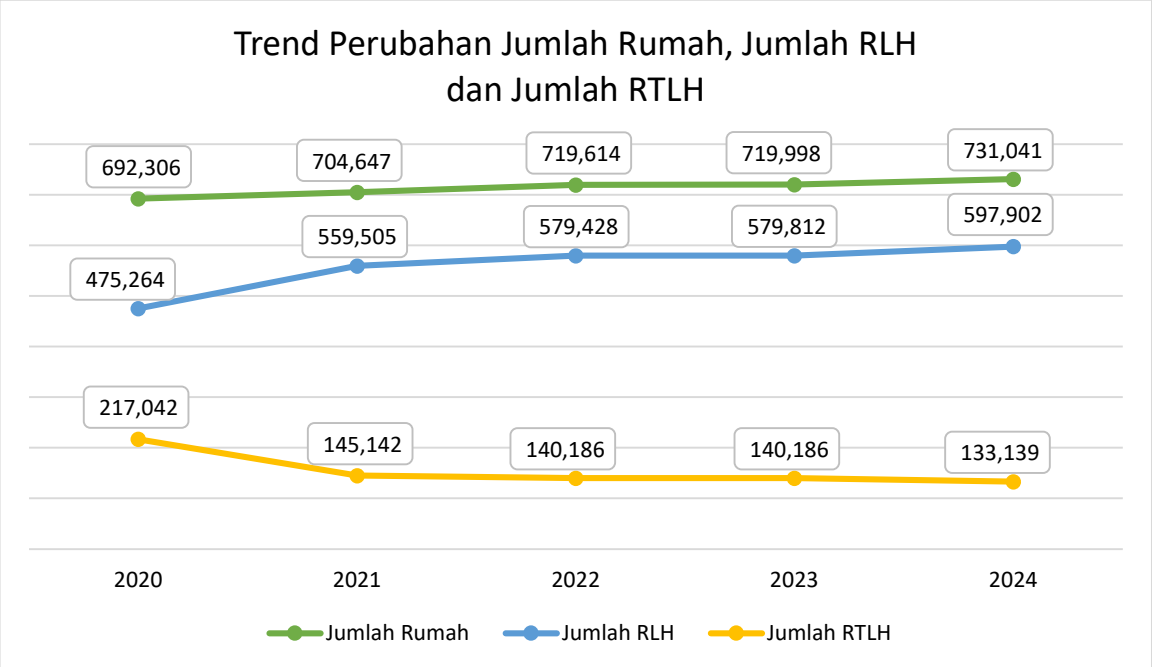
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II adalah salah satu Balai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan wilayah kerja yang mencakup Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat, serta terdiri dari 2 (dua) Satuan Kerja yang terbagi dalam Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

BP3KP dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi terkait penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran BP3KP sangat penting mengingat tingginya kebutuhan akan rumah yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan tantangan dalam penataan kawasan permukiman kumuh.

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Prinsip tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Artinya, rumah bukan hanya bangunan untuk berlindung, tetapi bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh rakyatnya.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi yang tertuang di dalam RPJMN tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan dalam Delapan Asta Cita, dimana Asta Cita yang berkaitan dengan Sektor Perumahan adalah Asta Cita nomor 3 meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas (mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur), nomor 6 membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta nomor 8 memperkuat penyelarasan kehidupan (yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur).

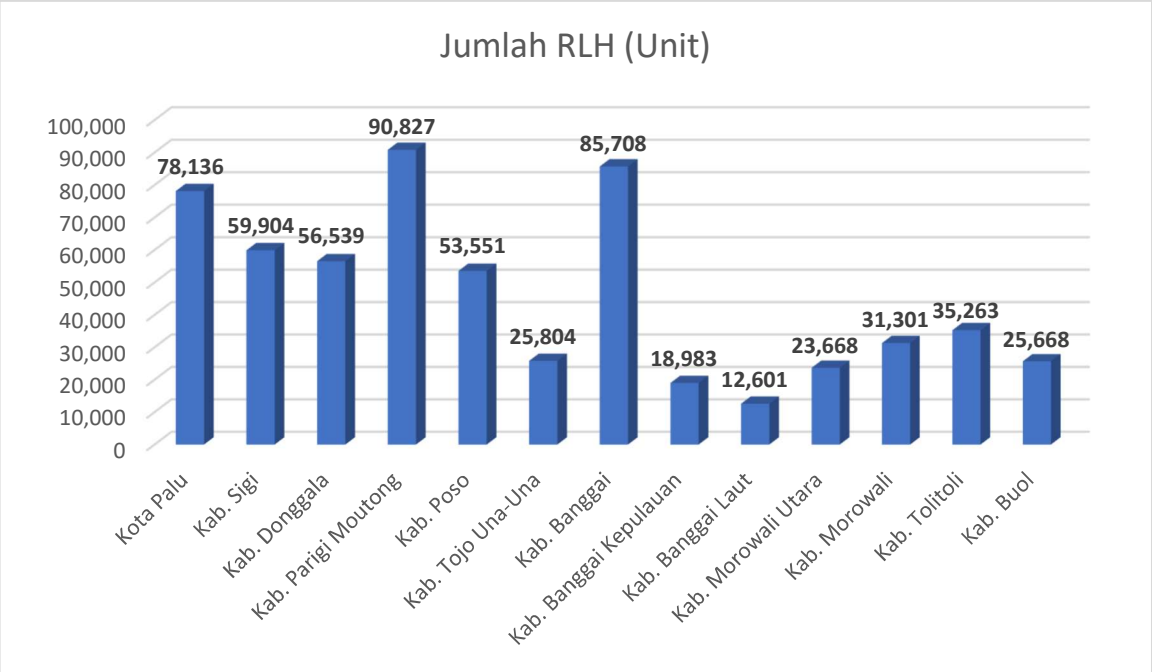


Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Gambar 1 Trend Perumahan Jumlah Rumah, Jumlah RLH dan Jumlah RTLH di Provinsi Sulawesi Tengah

Dari jumlah rumah yang dimiliki oleh kepala keluarga, sekitar 81,79% atau 597.902 unit merupakan rumah layak huni yang telah

memenuhi persyaratan kecukupan luas, kenyamanan ruang (penghawaan dan pencahayaan yang baik), keselamatan bangunan (kelayakan struktur dan material bangunan) dan PSU dasar hunian. Sedangkan sekitar 18,21% atau 133.139 unit rumah yang ada masih merupakan rumah tidak layak huni yang membutuhkan peningkatan kualitas agar menjadi layak huni. Berbagai bantuan peningkatan kualitas rumah dari berbagai sumber pendanaan dan skema pengelolaan telah diberikan oleh pemerintah sehingga Tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yang berjumlah 140.186 unit.



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Gambar 2 Diagram Sebaran Jumlah RLH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sebaran jumlah rumah layak huni pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di atas. Diagram tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah rumah terbesar memiliki rumah layak huni tertinggi mencapai 90.827 unit. Selanjutnya di urutan kedua dan ketiga terdapat Kabupaten Banggai 85.708 unit dan Kota Palu 78.136 unit. Kabupaten

Banggai laut yang memiliki jumlah rumah terkecil juga memiliki rumah layak huni paling rendah sekitar 12.601 unit.

Tabel 1 Angka Backlog Kepemilikan Rumah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (Unit)	Persentase Rumah Tangga Milik (%)	Jumlah Rumah Tangga Milik (Unit)	Backlog Kepemilikan Rumah (Unit)
2019	1.380.256	310.473	86,80	269.491	40.982
2020	1.419.229	315.443	87,56	276.202	39.241
2021	1.436.842	349.375	89,72	313.459	35.916
2022	1.458.606	333.038	92,51	308.093	24.945
2023	1.481.077	345.369	93,35	322.427	22.969

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Provinsi Sulawesi Barat 2024

Tabel 2 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit Rumah)	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit Rumah)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah)	Persentase Rumah Layak Huni (%)
2019	1.380.256	310.473	146.636	163.837	47,23
2020	1.419.229	315.443	159.772	155.671	50,65
2021	1.436.842	349.375	200.052	149.323	57,26
2022	1.458.606	333.038	184.403	148.635	55,37
2023	1.481.077	345.369	204.750	140.645	59,28

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Provinsi Sulawesi Barat 2024

Dari tabel di atas menunjukkan persentase ketersediaan rumah layak huni di Tahun 2023 mencapai 59,28 persen. Kenaikan yang cukup signifikan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 adalah adanya dukungan infrastruktur pelayanan dasar yang diarahkan pada perumahan dan kawasan permukiman, bentuk dukungan antara lain Pembangunan Rumah susun MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta pasca gempa bumi di Sulawesi Barat maka di Tahun 2022 mengalami lonjakan penurunan yang sangat signifikan.

Tabel 3 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	90,97	77,78	94,96	94,59	96,50
Polewali Mandar	81,02	87,64	83,47	86,18	84,67
Mamasa	22,91	58,74	32,42	35,07	31,47
Mamuju	71,34	72,66	81,06	82,14	85,87
Pasangkayu	79,16	78,29	88,56	86,81	89,19
Mamuju Tengah	68,78	72,64	77,42	78,23	77,88
Sulawesi Barat	**71,50**	**77,07**	**76,67**	**78,98**	**79,86**

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Sejak Tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan

memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 mengalami peningkatan. Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 mencapai 71,50 persen menjadi 79,86 persen di Tahun 2023.

Tabel 4 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	NO DAN TANGGAL SK KUMUH TERAKHIR	LUAS KUMUH (Ha)
1	KAB. TOLITOLI	NOMOR 201 TAHUN 2025 TANGGAL 14 MARET 2025	155.78
2	KAB. DONGGALA	NOMOR 188.45/0585/DPU TAHUN 2016 TANGGAL 01 APRIL 2016	83.39
3	KAB. TOJO UNA-UNA	NOMOR 188.45/226/DPKPLH TAHUN 2021 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2021	190.3
4	KAB. POSO	NOMOR 188.45/307-BAPELITBANGDA TAHUN 2020 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020	72.85
5	KAB. BUOL	NOMOR 188.04/645.50/DISPERKIM TAHUN 2023 TANGGAL 22 DESEMBER 2023	81.43
6	KAB. PARIGI MOUTONG	NOMOR 609.45/1571/DPKP TAHUN 2021 TANGGAL 18 JANUARI 2022	72.108
7	KAB. BANGGAI	NOMOR 800/56/DISPERKIMTAN TAHUN 2021 TANGGAL 10 JUNI 2021	78.81
8	KAB. BANGGAI LAUT	NOMOR 653/639/PU-PR TAHUN 2023 TANGGAL 14 DESEMBER 2023	170.70

9	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	NOMOR 338 TAHUN 2022 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022	93.00
10	KAB. MOROWALI	NOMOR 188.4.45/KEP.0199/DPKPP TAHUN 2022 TANGGAL 17 JUNI 2022	301.43
11	KAB. MOROWALI UTARA	NOMOR 188.45/KEP-B.MU/0213/X/ TAHUN 2023 TANGGAL 06 OKTOBER 2023	77.20
12	KOTA PALU	NOMOR 600.2.1/9592/DPKP.PERUMAHAN/ TAHUN 2024 TANGGAL 18 DESEMBER 2024	132.35
13	KAB. SIGI	NOMOR 596-210 TAHUN 2023 TANGGAL 17 MEI 2023	47.40
		TOTAL	**1556.748**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Permasalahan kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pembangunan infrastruktur di wilayah kerja BP3KP Sulawesi II. Di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan daftar rekapan data kumuh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah luas kawasan kumuh tercatat mencapai angka yang cukup signifikan, yakni 1.556,748 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran area pemukiman yang tidak layak huni, memiliki kepadatan bangunan yang sangat tinggi, serta minimnya akses sanitasi dan air bersih masih tersebar luas di berbagai wilayah kabupaten dan kota. Titik beban terluas di provinsi ini tidak berada di ibu kota provinsi, melainkan di Kabupaten Toli-Toli. Dengan luas kawasan kumuh mencapai 155,78 hektar, Toli-Toli menghadapi tantangan besar dalam merevitalisasi kawasan pesisir atau pusat keramaiannya agar menjadi lingkungan yang lebih sehat dan teratur bagi masyarakat.

Tabel 5 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	NO DAN TANGGAL SK KUMUH TERAKHIR	LUAS KUMUH (Ha)
1	KAB. PASANGKAYU	NOMOR 187 TAHUN 2025 TANGGAL 11 MARET 2025	87.14
2	KAB.MAMUJU	NOMOR 626 TAHUN 2024 TANGGAL 18 NOVEMBER 2024	65.68
3	KAB. MAJENE	NOMOR 100.3.3.2/823/XI TAHUN 2024 TANGGAL 06 NOVEMBER 2024	184.13
4	KAB. POLEWALI MANDAR	NOMOR 2320 TAHUN 2024 TANGGAL 20 JUNI 2024	6.85
5	KAB. MAMASA	NOMOR 648/KOTS-117/V TAHUN 2024 TANGGAL 28 MEI 2024	193.01
6	KAB. MAMUJU TENGAH	NOMOR 597.2/329/I TAHUN 2019 TANGGAL 30 JANUARI 2019	56.17
		TOTAL	**592.98**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Beralih Sulawesi Barat berdasarkan daftar rekapan data kumuh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan total luas kawasan kumuh sebesar 592,98 hektar. Meskipun secara akumulatif lebih kecil dibandingkan Sulawesi Tengah, konsentrasi wilayah kumuh di provinsi ini terlihat sangat terpusat di satu titik utama. Kabupaten Mamasa menjadi wilayah dengan sebaran kumuh terluas di Sulawesi Barat, yakni sebesar 193,01 hektar. Angka ini cukup mencolok karena mencakup hampir sepertiga dari total kawasan kumuh di seluruh provinsi tersebut. Karakteristik wilayah Mamasa yang berada di dataran tinggi memberikan tantangan tersendiri dalam penataan drainase dan aksesibilitas rumah tangga dibandingkan wilayah pesisir.

Adapun saat ini aspirasi masyarakat yang harus dijawab oleh BP3KP Sulawesi II terutama terkait dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dimana terdapat beberapa masalah di lapangan terkait dengan verifikasi usulan Pemerintah Daerah yang ternyata sudah tidak relevan lagi atau terbarukan, dikarenakan telah banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan telah terdata untuk menjadi calon penerima bantuan (CPB) ternyata telah layak huni dan telah mendapatkan bantuan pasca gempa Palu maupun Mamuju baik dari Pemerintah Daerah, Lembaga lain, maupun swasta. Serta terdapat pula tantangan terkait dengan CPB yang terdata memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk melakukan swadaya. Sehingga banyak terjadi di lapangan terkait dengan penggantian CPB yang membuat verifikasi memakan waktu yang lebih lama. Hal ini menjadi salah satu tuntutan yang dihadapi BP3KP Sulawesi II untuk lebih memperkuat sinergi lintas sektor serta koordinasi berkaitan dengan data kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan yang lebih efektif.

Transformasi sektor perumahan di wilayah kerja BP3KP Sulawesi II di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat selama periode 2020–2024 mencatat sebuah peran yang sangat penting. Upaya ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, melainkan memulihkan harkat hidup masyarakat pasca-bencana. Dalam penanggulangan pasca gempa di Sulawesi Tengah dari Tahun 2020 hingga 2024 BP3KP Sulawesi II telah melakukan pembangunan Hunian Tetap sebanyak 5.598 unit Hunian Tetap dalam bentuk RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang memiliki keunggulan tahan gempa, dibangun cepat, biaya efisien, dan menggunakan sistem knock-down (bongkar pasang) yang fleksibel, pembangunan RISHA ini terbagi di 3 Kabupaten Kota (Kota Palu, Kab. Sigi, dan Kab. Donggala).

Sebagai Entitas yang sebelumnya dinaungi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang sebelumnya masih Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II (BP2P Sulawesi II) kini menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II (BP3KP Sulawesi II) setelah transformasi menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan wilayah kerja yang masih sama yakni Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat dengan capaian kinerja Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 6 Target, Realisasi, dan Capaian BP3KP Sulawesi II Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	Satuan	Tahun															Jumlah		
			2020			2021			2022			2023			2024					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI II																				
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BP3KP Sulawesi II	Unit	10,559	10,559	100.00	2,100	6,580	313.33	2,160	6,932	320.93	3,574	3,574	100.00	2,000	2,446	122.30	20,393	30,091	147.56
2	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum BP3KP Sulawesi II	Unit	-	-	-	1,400	1,083	77.36	1,651	1,640	99.33	3,260	3,579	109.79	1,500	2,352	156.80	7,811	8,654	110.79
3	Rumah Khusus BP3KP Sulawesi II	Unit	76	56	73.68	64	1,050	1,640.63	120	1,810	1,508.33	3,306	3,436	103.93	-	483	483,00	3,566	6,835	191.67
4	Rumah Susun BP3KP Sulawesi II	Unit	79	99	125.32	239	250	104.60	126	168	133.33	181	181	100.00	141	44	31.21	766	742	96.87

Sumber: LAKIP BP2P Sulawesi II 2020-2024

Dalam menjalankan tugasnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II membawahi 2 (dua) Satuan Kerja yakni Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat. Berikut gambaran umum kewilayahan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat:

Sulawesi Tengah

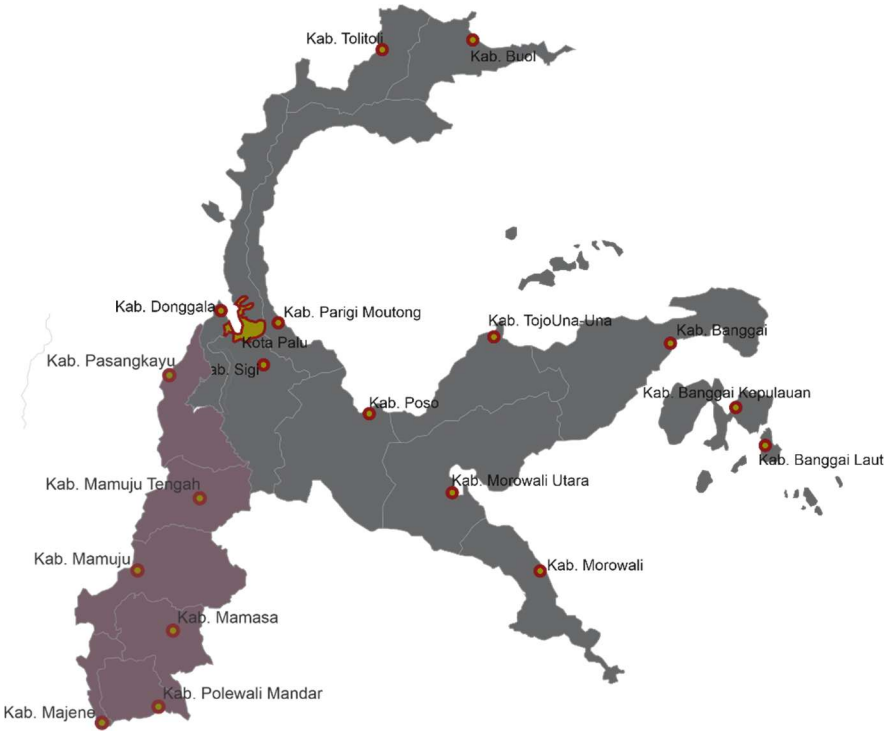
Fisik dan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042, ruang lingkup wilayah Sulawesi Tengah secara geografis terletak antara 2° 22' Lintang Utara dan 3° 48' Lintang Selatan dan di antara 119° 22'-124° 22' Bujur Timur serta dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 77.295,9 km^2 dengan jumlah pulau sebanyak 1.572 pulau. Luas wilayah perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 13.467.538 hektare yang meliputi wilayah darat dan wilayah laut, dengan batas wilayah perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo
- Timur : Provinsi Maluku Utara
- Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
- Barat : Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025), Sulawesi Tengah memiliki total luas wilayah 61.605,718 km^2 terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut

dan Kota Palu, yang terdiri dari 176 Kecamatan dan 2.020 Desa/Kelurahan.



Gambar 3 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki resiko bencana yang cukup tinggi, terutama terkait dengan gempa bumi dan likuifaksi. Potensi resiko bencana geologi seperti gempa tektonik dijalur patahan Palu Koro yang membelah dari Teluk Palu hingga Lembah Bone masih dominan. Sesar ini merupakan sesar sinistral aktif dengan kecepatan pergeseran sekitar 25-30 mm/tahun. Pada umumnya, potensi kerusakan akibat gempa bumi yang bersumber dari sesar aktif menimbulkan kerugian dan kerusakan lebih parah dibandingkan gempa bumi yang bersumber di lautan pada skala magnitudo yang sama. Gempa bumi ini menimbulkan kerusakan bangunan dan menelan ribuan korban jiwa (Lien Sururoh dkk, 2020). Bahaya Tsunami juga dapat mengancam kawasan pariwisata di wilayah pesisir.

Tata Guna Lahan

Luas wilayah permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan dalam 6 Tahun terakhir. Tahun 2019, luas permukiman sebesar 51.286 Ha kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 mencapai 72.492 Ha atau 1,18% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, pada Tahun 2024 luas wilayah permukiman mengalami penurunan kembali menjadi 62.835 Ha atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun wilayah permukiman terluas berada di Kabupaten Parigi Moutong yang mencapai 38,12% dari keseluruhan luas permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Laut merupakan kabupaten dengan luas wilayah permukiman terkecil yakni seluas 479 Ha atau sekitar 0,76% dari luas permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 yakni PKN (Pusat Kegiatan Nasional) berada di Kota Palu; PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdapat di Wilayah Banawa di Kabupaten Donggala, Buol di Kabupaten Buol, Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara, Luwuk di Kabupaten Banggai, Poso di Kabupaten Poso, dan Tolitoli di Kabupaten Tolitoli; PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yaitu Tolitoli di Kabupaten Tolitoli; serta PKL (Pusat Kegiatan Lokal berada di Wilayah Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai di Kabupaten Banggai Laut, Bangkir di Kabupaten Tolitoli, Beteleme di Kabupaten Morowali Utara, Bora di Kabupaten Sigi, Bungku di Kabupaten Morowali, Bunta di Kabupaten Banggai, Cendana Pura di Kabupaten Banggai, Labuan di Kabupaten Donggala, Malala di Kabupaten Tolitoli, Moutong di Kabupaten Parigi Moutong, Pagimana di Kabupaten Banggai, Paleleh di Kabupaten Buol, Parigi di Kabupaten Parigi Moutong, Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Tambu di Kabupaten Donggala, Tangeban di Kabupaten Banggai, Tentena di Kabupaten Poso, Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong, Wakai di

Kabupaten Tojo Una-Una, Watatu di Kabupaten Donggala, dan Wuasa di Kabupaten Poso.

Terdapat juga arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Sulawesi Tengah Emas yakni Pembangunan berbasis klaster (RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029). Pembangunan dilakukan berbasis klaster perwilayahan seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 - 2042, yaitu:

- Klaster Perkotaan Pasigala meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi;
- Klaster Agropolitan yaitu Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara. Agropolitan Bolipamuso meliputi Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso; Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli;
- Klaster Industri Morubang meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara; dan
- Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju meliputi sebagian Kabupaten Bangai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una-Una.

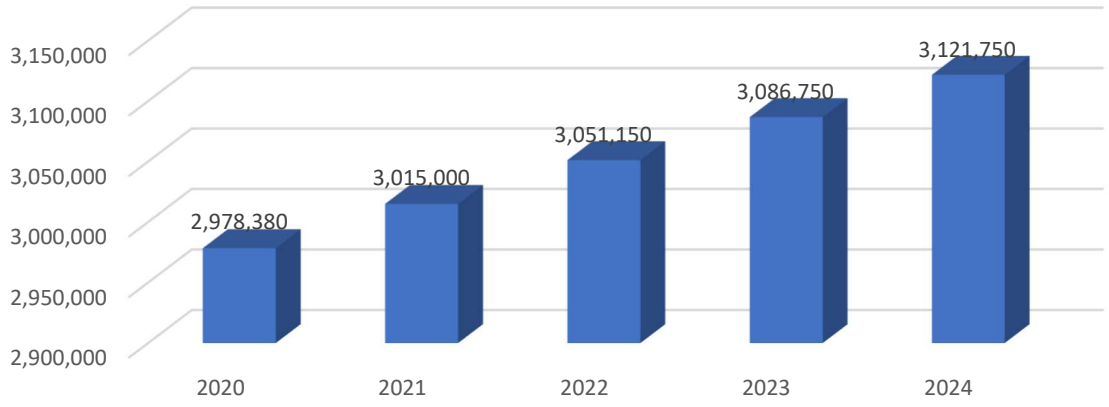
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur wilayah sebagai upaya meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Upaya ini dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tujuan penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif

dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis mitigasi bencana.

Kependudukan

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk selama kurun Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 2.978.380 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 3.121.750 jiwa pada Tahun 2024, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1-1,5 persen Pertahunnya dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa per kilometer persegi.

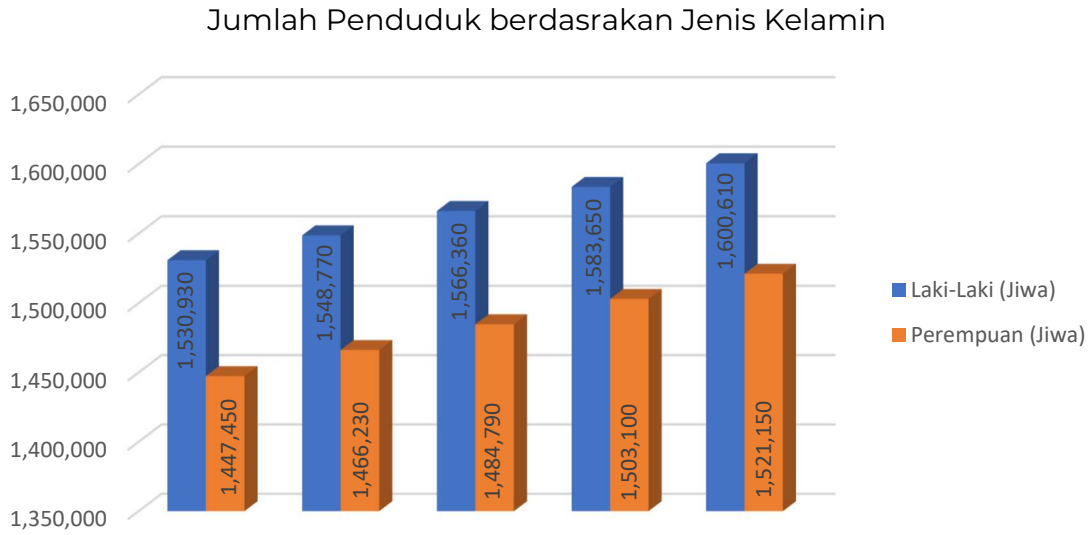
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 (Jiwa)



Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2025-2029

Gambar 4 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengahselama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 didominasi oleh kaum laki-laki yakni pada Tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.530.930 jiwa meningkat menjadi 1.600.610 jiwa pada Tahun 2024, sedangkan jumlah penduduk perempuan yakni dari 1.447.450 jiwa pada Tahun 2020 meningkat menjadi 1.521.150 jiwa pada Tahun 2024.

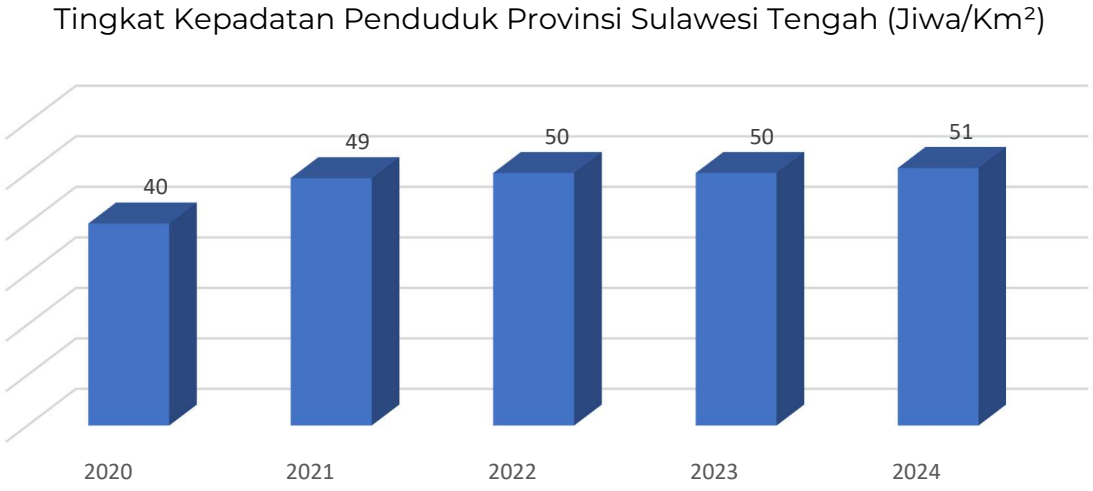


Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2025-2029

Gambar 5 *Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024*

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah padaTahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung menurun danangkanya relatif kecil yakni dari 1,22 persen pada Tahun 2020 menurun menjadi 1,20 persen pada Tahun 2024.

Usia produktif sangat penting untuk mendukung produktivitas dan kualitas hidup. Usia produktif ditandai dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efektif dan efisien. Kategori usia produktif menurut BPS yakni penduduk yang berusia 15 Tahun sampai dengan 64 tahun. Berdasarkan data BPS, Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 memiliki bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif terhadap total penduduk lebih dari 60 persen, yakni dari 67,92 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 68,18 persen pada Tahun 2024.



Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2025-2029

Gambar 6 *Tingkat Kepadatan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024*

Berdasarkan data BPS, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kecenderungan meningkat yakni dari 40 jiwa/km² pada Tahun 2020 menjadi 51 jiwa/km² pada Tahun 2024.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yakni dari 13,06 persen (403.740 jiwa) pada Tahun 2020 menjadi 11,04 persen (358.330 jiwa) pada Tahun 2024. Dalam perspektif kemiskinan ekstrem, tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami penurunan yakni dari 3,15 persen pada Tahun 2021 menurun menjadi 1,27 persen pada Tahun 2024.

Tabel *7 Tingkat Kemiskinan Ekstrim Provinsi Sulawesi Tengah 2021 - 2024*

No.	Nama Daerah	Tingkat Kemiskinan Ekstrim (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulauan	1,50	1,34	1,87	1,41
2	Banggai	1,81	1,44	0,00	1,15

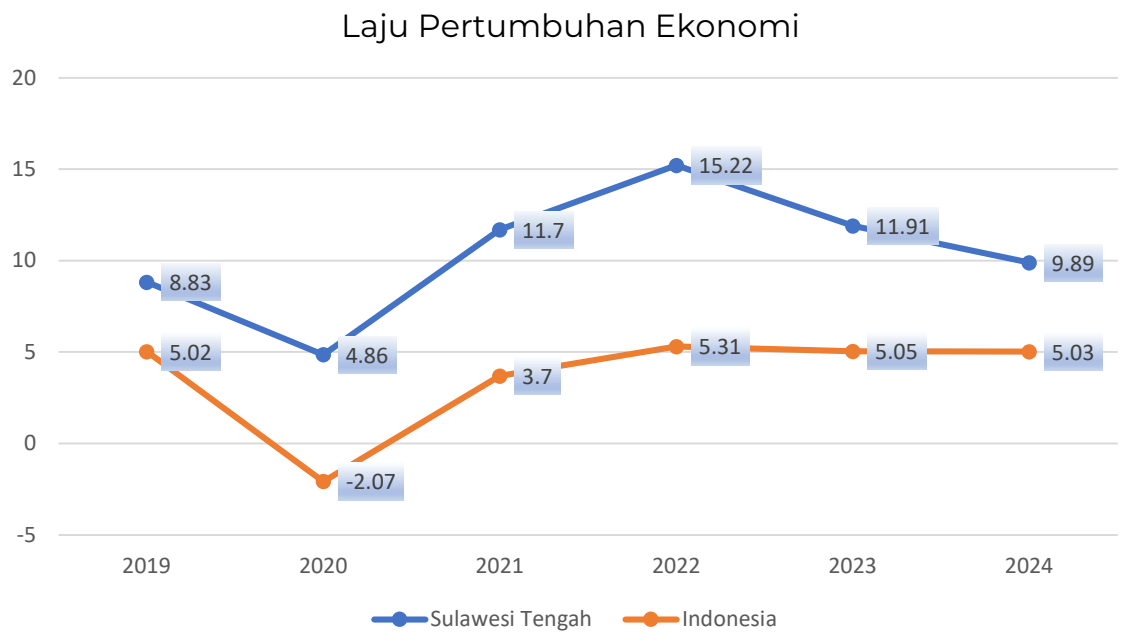
3	Morowali	2,86	3,24	0,73	1,23
4	Poso	4,17	3,36	1,80	1,33
5	Donggala	3,61	3,59	1,94	1,39
6	Toli-toli	1,26	1,51	1,14	1,26
7	Buol	2,69	1,24	0,52	1,66
8	Parigi Moutong	5,96	6,39	2,41	1,32
9	Tojo Unauna	5,27	3,42	1,31	2,16
10	Sigi	1,82	2,54	2,07	1,83
11	Banggai Laut	5,40	3,93	1,67	1,12
12	Morowali Utara	4,34	3,04	3,38	1,28
13	Kota Palu	0,90	1,63	0,58	0,36
Provinsi Sulawesi Tengah		**3,15**	**3,02**	**1,44**	**1,27**

Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2025-2029

Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan prestasi yang spektakuler. Prestasi kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya, dan berada di atas nasional. Kecuali pada Tahun 2020 sedikit melambat sebagai konsekuensi adanya pembatasan larangan ekspor bahan mentah minerba sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta adanya Bencana Alam berupa gempa bumi tsunami dan liquifaksi serta bencana pandemi Covid-19. Selanjutnya pasca pandemi Covid-19 kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah kembali menujukkan kinerja

yang membaik hingga Tahun 2023. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebagai berikut:



Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2025-2029

Gambar 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 -2024

Tengah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif yakni pada Tahun 2019 LPE sebesar 8,83 persen menurun menjadi 4,86 persen pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 LPE meningkat menjadi 11,70 persen, dan kembali meningkat menjadi 15,17 persen pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 LPE menurun menjadi 11,91 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 9,89 persen. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 9,89 persen mengalami perlambatan akibat dari melemahnya permintaan ekspor barang dan jasa terutama permintaan hasil pengolahan biji nikel ke luar negeri sebagai konsekuensi dari lesunya perekonomian global.

Dilihat dari struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 3 (tiga) sektor yang berkontribusi besar dan memberikan andil dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Perkembangan kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kecenderungan yang menurun yakni dari 21,76 persen pada Tahun 2020 menjadi 15,80 persen pada Tahun 2024. Sementara Kontribusi Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari 27,61 persen pada Tahun 2020 menjadi 41,18 persen pada Tahun 2024, sedangan kontribusi sektor pertambagan dan penggalian relatif kecil peningkatannya yakni dari 13,40 persen pada Tahun 2020 menjadi 14,64 persen pada Tahun 2024.

Capaian indeks gini Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kecenderungan menurun, yakni dari 0,321 pada Tahun 2020 menjadi 0,309 pada Tahun 2024. Capaian indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih baik dibandingkan dengan capaian indeks gini Nasional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita adalah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah/daerah dalam selang waktu satu Tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Capaian PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari Rp.66,31 juta pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp.120,75 juta pada Tahun 2024.

Sulawesi Barat

Fisik dan Lingkungan

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 dengan Ibu kota adalah Kabupaten Mamuju. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat Pulau Sulawesi, terletak pada posisi geografis 0°12' - 03°38' Lintang Selatan (LS) dan 118°43' 15" - 119° 54' 3" Bujur Timur (BT). Posisi ini menempatkan Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah strategis yang dikenal dengan "silang segitiga mas" antara Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar yang menjadi modal geografis pembangunan daerah kedepannya karena posisinya dekat dengan jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional. Sebelah Utara Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Barat menjadi 16.594,74 km^2. Karena didominasi oleh laut, panjang garis pantai Provinsi Sulawesi Barat mencapai 677 km dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40 pulau, Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terbagi-bagi menjadi enam kabupaten, 69 kecamatan, 74 kelurahan, dan 576 desa.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki topografi yang beragam, dari datar, berbukit sampai bergunung. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu memiliki topografi datar, sedangkan Kabupaten Mamuju, Majene, dan Mamasa memiliki

topografi berbukit sampai bergunung. Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar. Berdasarkan data BPS, ada empat desa di Provinsi Sulawesi Barat yang secara topografi berada di daerah Lembah, satu desa berada di Kabupaten Pasangkayu dan tiga desa ada di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai daerah yang dominan lereng, Provinsi Sulawesi Barat memiliki beberapa gunung yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi Masyarakat. Berdasarkan data, sekitar 193 gunung masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat, dimana Gunung Ganda Dewata merupakan gunung tertinggi dengan elevasi 3.037 meter di atas permukaan laut yang berada di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas, yang mencakup sekitar 70% dari total luas. Itu biasanya terletak di bagian tengah ke timur dan memanjang dari utara ke selatan, membentuk lembah yang curam.

Tak hanya menyimpan sumber daya alam, wilayah laut dan gunung Provinsi Sulawesi Barat juga berpotensi menjadi sumber bencana alam, terutama jika aktivitas eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Itu sebabnya, wajar jika Provinsi Sulawesi Barat ditempatkan sebagai provinsi kedua di Indonesia yang masuk dalam wilayah daftar rawan bencana. Menurut indeks risiko bencana yang dirilis oleh BNPB, Provinsi Sulawesi Barat termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Dari seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan kedua paling rentan terhadap bencana, dan dari 528 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, Majene berada di urutan kedua terburuk di Indonesia.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan

kerusakan lahan. Gempa bumi juga menjadi ancaman serius di wilayah ini, seperti yang terjadi pada Tahun 2021 di mana gempa mengakibatkan tidak hanya kerusakan signifikan pada bangunan, namun juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Provinsi Sulawesi Barat memiliki indeks risiko 160.08 (tinggi) dan merupakan skor IRBI tertinggi secara Nasional.

Berdasarkan data pada Buku IRBI Tahun 2023 secara keseluruhan 6 Kabupaten di Sulawesi Barat memiliki skor IRBI yang tinggi, mencerminkan kerentanannya terhadap berbagai jenis bencana alam. Majene rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Kabupaten Pasangkayu memiliki skor IRBI sebesar 176,80 poin juga dalam kategori risiko tinggi. Pasangkayu rentan terhadap banjir dan gempa bumi. Kabupaten Mamuju memiliki skor IRBI sebesar 161,71 poin masuk dalam kategori risiko tinggi. Mamuju sering mengalami gempa bumi. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki skor IRBI sebesar 159,33 poin juga dalam kategori risiko tinggi. Wilayah ini rentan terhadap banjir dan gempa bumi. Kabupaten Mamasa memiliki skor IRBI sebesar 139,87 poin masuk dalam kategori risiko sedang. Tanah longsor menjadi perhatian utama di wilayah ini. Kabupaten Polewali Mandar memiliki skor IRBI sebesar 135,93, juga dalam kategori risiko sedang. Banjir dan tanah longsor mempengaruhi skor IRBI di Polewali Mandar.

Tata Guna Lahan

Rencana struktur ruang pusat permukiman di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2043 yakni PKN (Pusat Kegiatan Nasional meliputi sebagian wilayah Kabupaten Mamuju, Pusat Kegiatan Wilayah terdiri dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu, serta PKL (Pusat Kegiatan Lokal) berada di Kawasan Perkotaan Mamasa, Mambi, dan Sumarorong di Kabupaten Mamasa, Kawasan Perkotaan Papalang di kabupaten Mamuju, Kawasan Perkotaan Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kawasan

Perkotaan Balanipa, Polewali, dan Sidodadi di Kabupaten Polewali Mandar.

Dukungan infrastruktur pelayanan dasar yang diarahkan pada perumahan dan kawasan permukiman, bentuk dukungan antara lain Pembangunan Rumah susun MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

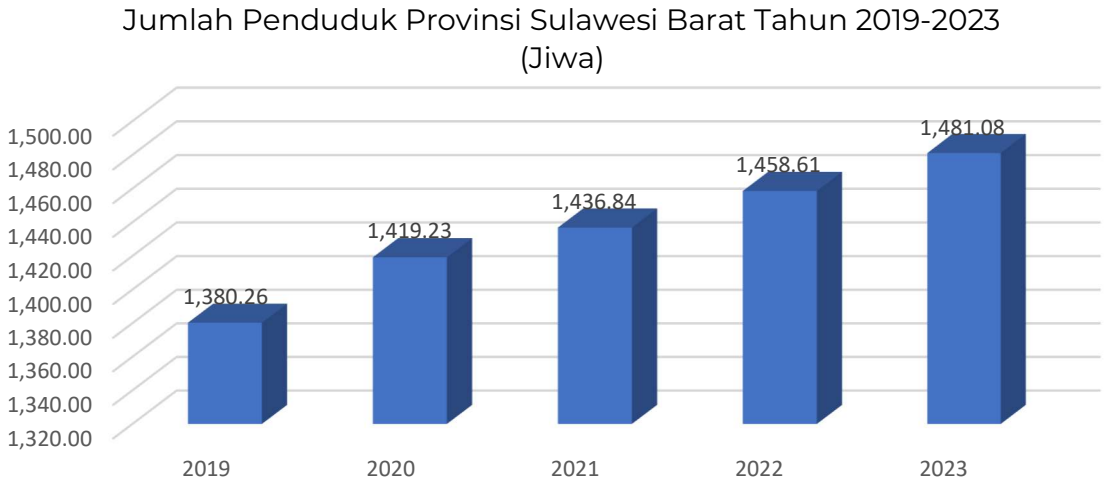
Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat telah dan sedangdilaksanakan, baik melalui pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun Loan melalui Program-program Nasional, seperti Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kementerian PUPR. Namun demikian, dari 6 (enam) Kabupaten, baru terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang secara rutin melakukan evaluasi perhitungan capaian penanganan permukiman kumuh setiap Tahun. Kabupaten tersebut adalah Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, dan Kab. Mamasa.

Selain capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah, dari kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah berjalan, dari 7 (tujuh) Aspek kekumuhan, kegiatan masih dominan pada penanganan aspek Jalan lingkungan dan Drainase Lingkungan, sedangkan 5 (lima) lainnya, seperti Kondisi Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Bangunan Gedung dan Proteksi Kebakaran masih belum tertangani dengan maksimal. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh kurang terlihat merubah wajah kawasan permukiman, karena kegiatan tidak dilaksanakan secara tuntas pada suatu kawasan tertentu pada semua aspek kekumuhan.

Arah kebijakan investasi dan Kerjasama antardaerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yaitu domestik (Menghubungkan Kawasan Ekonomi dan Pelabuhan/Bandara); peningkatan aksesibilitas jalan provinsi dalam kondisi mantap; pengembangan jaringan telekomunikasi; Peningkatan akses listrik bagi semua; pengembangan pelabuhan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi; pemanfaatan ALKI II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global; dukungan pengembangan bandara utama yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah.

Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.481.077 jiwa terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 750.773 jiwa dan perempuan sebanyak 730.304 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.54 persen dengan kepadatan penduduk 89 penduduk per km^2.

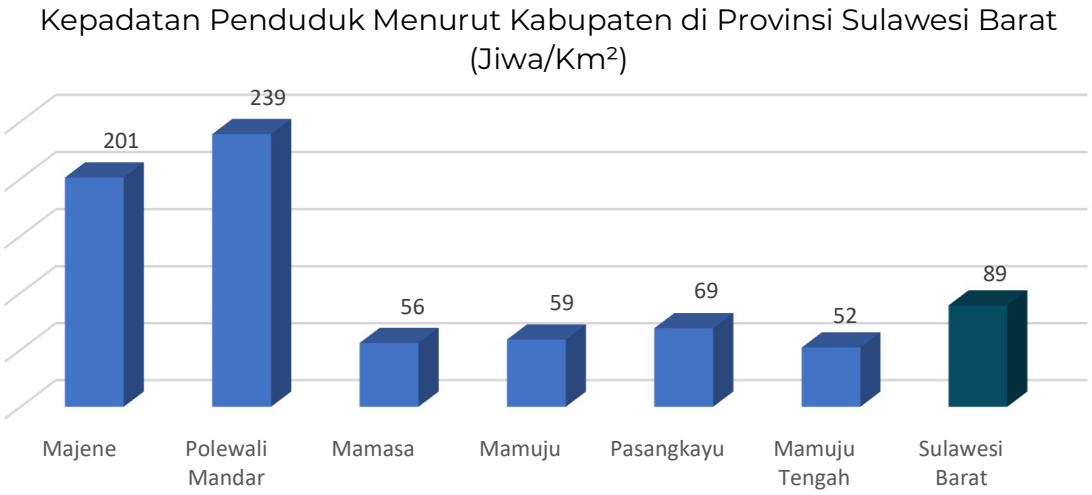


Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Barat 2025-2029

Gambar 8 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

Ditinjau dari persebaran penduduk di masing-masing Kabupaten pada Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan bahwa Kabupaten Polewali Mandarmerupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar

memiliki persentase penduduk sebesar 33,45 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat dengan kepadatan penduduk sebesar 239 jiwa per km². Sama halnya dengan kepadatan penduduk. Sebaliknya, Kabupaten Mamuju Tengah menjadi kabupaten dengan persentase penduduk yang paling rendah yaitu sebesar 9,62 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 52 jiwa per km².



Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Barat 2025-2029

Gambar 9 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Meski tak banyak berubah komposisi penduduk perempuan dan laki-laki, namun yang menarik dicermati oleh pemerintah daerah adalah penduduk berdasarkan usia karena dari komposisi inilah Provinsi Sulawesi Barat diklaim memasuki fase bonus demografi. Bonus demografi adalah situasi demografis yang menunjukkan proporsi penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan usia yang belum dan tidak produktif. Usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 Tahun, usia belum produktif 0-14 Tahun, dan usia tidak produktif 65 Tahun ke atas. Tahun 2023, jumlah penduduk berusia belum produktif mencapai 409.475 jiwa, yang terdiri dari 210.138 jiwa penduduk laki-laki dan 203.982 jiwa penduduk Perempuan. Berdasarkan kelompok umur, jumlah populasi berusia 0-4 Tahun lebih banyak yaitu 143.947 jiwa,

penduduk berusia 5-9 Tahun mencapai 135.249 jiwa, dan penduduk 10-14 Tahun sebanyak 134.924 jiwa. Jika diproporsikan dengan total penduduk Provinsi Sulawesi Barat, maka penduduk usia belum produktif 27,96 persen dari total populasi. Total penduduk usia tidak produktif Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 76.490 jiwa, 32.416 jiwa berusia 65-69 Tahun, 21.984 jiwa berada pada rentan usia 70-74 Tahun, dan 22.090 jiwa termasuk dalam kategori usia 75 Tahun ke atas. Penduduk usia produktif Provinsi Sulawesi Barat mencapai 857.631 jiwa atau setara dengan 57,90 persen dari total populasi Provinsi Sulawesi Barat. Penduduk usia produksi Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk berusia 15-19 Tahun dan 20-24 Tahun, semakin bertambah usianya, semakin kecil jumlah populasinya.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di antara berbagai sektor. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 sampai dengan 2023 terus menunjukkan grafik yang fluktuatif dari Tahun ke Tahun yaitu 10,95 persen pada (September) Tahun 2019 menjadi 11,92 persen pada Tahun 2022 (Maret) dan pada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 11,49 persen atau menurun 0,43 persen poin. Pencapaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,36 persen pada Tahun 2023. Rata-rata peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,13 poin persentase per Tahun sedangkan nasional sebesar 0,03 poin persentase per Tahun.

Tabel 8 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

No.	Nama Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Majene	23,76	24,12	25,01	26,62	25,80
2	Polewali Mandar	68,86	68,18	69,32	72,87	71,92
3	Mamasa	21,64	21,86	22,29	23,70	23,58
4	Mamuju	20,57	20,65	22,30	23,26	23,50
5	Pasangkayu	7,42	7,95	8,53	9,30	8,94
6	Mamuju Tengah	9,16	9,25	9,74	9,98	10,39
Provinsi Sulawesi Barat		**151,40**	**152,02**	**157,19**	**165,72**	**164,14**

Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Barat 2025-2029

Tabel 9 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

No.	Nama Daerah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Majene	13,72	13,73	14,34	15,13	14,54
2	Polewali Mandar	15,60	15,26	15,68	16,39	16,08
3	Mamasa	13,42	13,38	13,77	14,51	14,31
4	Mamuju	7,06	6,92	7,46	5,09	4,79
5	Pasangkayu	4,28	4,48	4,77	5,09	4,79
6	Mamuju Tengah	6,87	6,79	7,13	7,17	7,32
Provinsi Sulawesi Barat		**11,02**	**10,87**	**11,29**	**11,75**	**11,49**

Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Barat 2025-2029

Tabel 10 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

No.	Nama Daerah	Garis Kemiskinan (Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Majene	332.145	384.344	399.350	433.111	461.255
2	Polewali Mandar	259.969	401.057	416.443	452.836	482.658

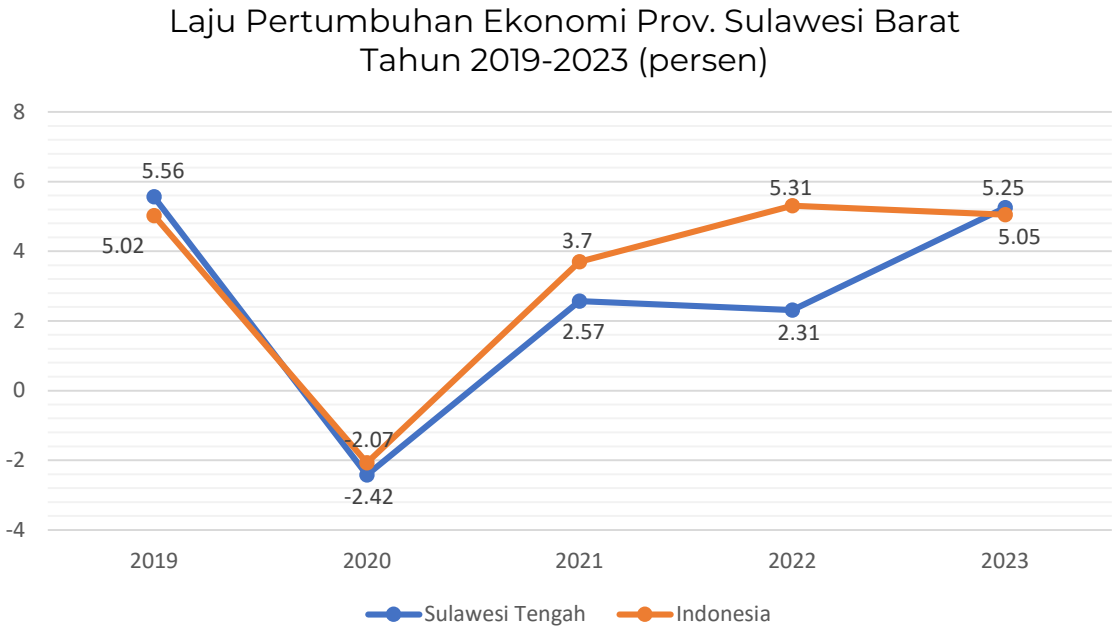
3	Mamasa	256.544	273.513	283.758	312.206	329.768
4	Mamuju	376.827	277.078	287.896	319.586	340.795
5	Pasangkayu	360.362	354.115	367.941	404.318	432.269
6	Mamuju Tengah	239.592	255.440	265.413	290.030	309.227
Provinsi Sulawesi Barat		**339.942**	**352.874**	**364.251**	**405.187**	**433.131**

Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Barat 2025-2029

Garis Kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2019 garis kemiskinan sebesar 339.942 rupiah per kapita per bulan, naik pada Tahun 2023 sebesar 433.131 rupiah per kapita per bulan. Angka ini menjadi suatu capaian positif meskipun pada saat yang bersamaan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari Tahun 2019 sebesar 151,87 ribu jiwa menjadi 164,14 ribu jiwa pada Tahun 2023. Kenaikan garis kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum membaik selama masa endemi covid-19.

Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi Barat, pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi berada di 5,25 persen, capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 2,31 persen.



Sumber: RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2025-2029

Gambar 10 *Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023*

Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk Sulawesi Barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 4,24 persen pada Tahun 2023, mengalami peningkatan dari Tahun 2022. Pada Tahun 2023 hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya disebabkan oleh berputarnya perekonomian setelah pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,46 persen Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,47 persen dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,30 persen. Sementara Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dalam pertumbuhannya sampai 10,08 persen.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,351 angka ini naik sebesar 0,020

poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2022 yang sebesar 0,371, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi penurunan perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak signifikan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Penyusunan strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II didasarkan pada analisis komprehensif terhadap kondisi internal dan eksternal. Subbab ini menjelaskan analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah di tingkat wilayah maupun nasional yang dapat memengaruhi pencapaian target pada periode lima tahun ke depan.

1.2.1 Potensi

Potensi pengembangan perumahan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dengan adanya 12 kabupaten dan 1 kota (Kota Palu) serta 2.020 desa/kelurahan, kebutuhan akan hunian tersebar luas. Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan Kabupaten seperti Sigi, Parigi Moutong, serta Donggala menjadi titik konsentrasi utama permintaan rumah;
b. Keberadaan kabupaten seperti Morowali. Morowali Utara, dan Luwuk Banggai yang kini berkembang sebagai kawasan industri memberikan potensi besar bagi penyediaan perumahan bagi pekerja;
c. Kawasan Strategis "Silang Segitiga Mas" berbatasan dengan Kaltim (dekat IKN), Sulsel, dan Sulteng menjadikan Sulbar wilayah strategis untuk hunian transit maupun hunian permanen bagi pelaku usaha dan logistic;

d. Sulawesi Barat yang memiliki risiko bencana yang tinggi membuatnya dapat menjadi potensi BPK3KP Sulawesi II dalam membantu masyarakat mengembangkan perumahan yang adaptif terhadap bencana yang ada di tiap Kabupaten;
e. Rencana Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat sangat berpengaruh besar dalam pengembangan utama perumahan terutama pada daerah PKN yakni Kota Palu dan Kabupaten Mamuju sebagai pusat utama memiliki potensi tertinggi untuk pengembangan hunian perkotaan, serta Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki klaster Perkotaan, Industri, dan Pariwisata memiliki peluang besar dalam pengembangan perumahan;
f. Proporsi usia produktif, kepadatan penduduk, serta dominasi penduduk laki-laki di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah merupakan potensi utama dalam pengembangan rumah tipe menengah dan rumah subsidi;
g. Sulawesi Tengah menunjukkan performa ekonomi yang sangat kuat dengan LPE yang sering berada di atas nasional. Kenaikan PDRB per kapita dari Rp66,31 juta (2020) menjadi Rp120,75 juta (2024) menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan. emerataan pendapatan yang lebih baik daripada rata-rata nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati banyak lapisan masyarakat. Ini berarti pasar Rumah Subsidi dan Rumah Komersial memiliki basis konsumen yang sangat luas dan stabil.
h. Ekonomi Sulawesi Barat sedang dalam masa pemulihan dengan fokus pada sektor industri dan jasa. Pertumbuhan tertinggi di lapangan usaha Industri Pengolahan (14,46%) serta Penyedia Akomodasi dan Makan Minum (10,47%) menciptakan kebutuhan hunian bagi tenaga kerja jasa dan profesional di perkotaan seperti Mamuju dan Polewali Mandar.

1.2.2 Analisis Permasalahan Jangka Menengah

Dalam menjalankan mandat penyediaan perumahan di wilayah Sulawesi II, BP3KP dihadapkan pada dinamika permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Analisis berikut menyoroti tantangan jangka menengah yang mencakup tingginya angka *Backlog* perumahan, kendala geografis dalam pendistribusian material, serta perlunya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Pemetaan ini berfungsi sebagai basis penentuan skala prioritas dalam intervensi kebijakan selama lima tahun ke depan.

a. Angka *Backlog* Kepemilikan dan Rumah Tidak Layak Huni

   Angka *Backlog* kepemilikan 30,99% (328.219 keluarga) dan *Backlog* rumah tidak layak huni 12,57% (133.139 keluarga) di Provinsi Sulawesi Tengah serta *Backlog* kepemilikan 9,73% (34.090 keluarga) dan *Backlog* rumah tidak layak huni 17,42% (61.056 keluarga) di Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu tantangan BP3KP Sulawesi II dalam lima tahun kedepan untuk memenuhi kepemilikan dan rumah layak huni untuk masyarakat agar dapat terpenuhi.

b. Akurasi Data dan Target Sasaran

   Masalah utama terletak pada validitas data dinamis di lapangan. Penggunaan data statis seperti DTSEN seringkali tidak mengejar kecepatan perubahan kondisi ekonomi masyarakat, dimana penerima bantuan (CPB) ternyata sudah mampu melakukan renovasi mandiri sebelum bantuan tiba atau telah mendapatkan bantuan perumahan terutama untuk masyarakat terdampak gempa. Ketidaktepatan sasaran menurunkan efisiensi waktu pelaksanaan verifikasi

c. Logistik dan Standarisasi Biaya

   Kondisi geografis Indonesia yang beragam belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan satu harga (*flat rate*). Harga

satuan pusat kabupaten tidak mencukupi untuk lokasi dengan akses sulit karena tingginya biaya distribusi material contohnya pada daerah kepulauan seperti Banggai Kepulauan dan desa-desa di pegunungan di Mamasa yang masih susah aksesnya sehingga dapat mengakibatkan penurunan kualitas bangunan karena pemotongan spesifikasi material demi menutupi biaya angkut, atau proyek mangkrak karena material tidak kunjung tiba. Ada pula daerah pertambangan seperti Morowali yang memiliki dana bantuan perumahan dari Pemerintah Daerah yang lebih besar daripada program BSPS dari Pusat atau Kementerian PKP sehingga akan sulit untuk di salurkan karena dapat menyebabkan kecemburuan sosial dari masyarakat.

d. Sinergi Anggaran dan Komitmen *Stakeholder*

   Target 3 Juta Rumah akan sulit tercapai jika hanya mengandalkan satu sumber pendanaan yakni APBN sehingga dibutuhkan sinergi antar semua *stakeholder* serta sinergitas dengan sumber pendanaan lainnya dalam memenuhi target program 3 Juta Rumah.

e. Kendala Teknis Pelaksanaan dan Iklim

   Faktor eksternal seperti kurangnya tenaga kerja (tukang) dan perubahan iklim menjadi penghambat progres fisik. Kurangnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat di daerah dan pola musim hujan yang tidak menentu dapat menghambat pekerjaan di lapangan, bukan hanya menghambat proses pelaksanaan tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan material yang telah di distribusikan.

f. Digitalisasi dan Manajemen Antrean

   Kapasitas eksekusi belum sebanding dengan volume usulan yang masuk dikarenakan terbatasnya kuota yang di dapat untuk dilakukan penanganan. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem layanan digital pemerintah jika usulan yang dapat di

tangani tidak berbanding lurus dengan jumlah usulan yang telah dimasukkan.

g. Pemulihan Pascabencana

Penanganan dampak bencana jangka panjang masih menyisakan pekerjaan rumah yang signifikan di wilayah kerja BP3KP Sulawesi II, contohnya di Sulawesi Tengah masih terdapat 600 KK korban likuifaksi di PASIGALA (Palu, Sigi, Donggala) yang belum mendapatkan Hunian Tetap (Huntap). Hal ini dapat menjadi masalah jangka menengah dimana dapat berdampak pada Risiko sosial dan penurunan taraf hidup bagi penyintas yang terlalu lama berada di hunian sementara atau lokasi tidak layak.

1.2.3 Analisis Faktor Internal

Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) BP3KP Sulawesi II merupakan elemen-elemen yang berada dalam kendali Balai dan memengaruhi kemampuan Balai dalam mencapai tujuannya.

a. Kekuatan (*Strenghts*)

No.	Kekuatan (*Strenghts*) BP3KP Sulawesi II	Uraian
1	Sistem Digital yang Mapan	Adanya aplikasi **SIBARU** menunjukkan kesiapan infrastruktur data untuk menampung usulan secara sistematis, serta pengembangan aplikasi lain seperti **myPKP** yang dapat mempermudah *update* data dari Balai ke Pusat.
2	Sumber Daya Manusia Ahli	Memiliki tenaga teknis yang tersertifikasi dan telah memiliki pengalaman kuat dalam pengawasan konstruksi dan manajemen proyek perumahan.
3	Target Program Jelas	Adanya target **Program 3 Juta Rumah** yang memberikan arah kebijakan nasional yang kuat.

4	Komitmen Reformasi Birokrasi	Adanya upaya transformasi digital melalui aplikasi myPKP untuk mendukung Zona Integritas (ZI), Sistem Pengendalian Intern (SPIP), dan manajemen risiko, yang didukung oleh pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) instansi induk dalam kategori sangat baik.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

No.	Kelemahan (*Weaknesses*) BP3KP Sulawesi II	Uraian
1	Validitas Data	Ketidaksesuaian data calon penerima bantuan dengan realitas lapangan dapat mengakibatkan salah sasaran, kecemburuan sosial, dan mengurangi efisiensi pelaksanaan proses verifikasi
2	Keseragaman Anggaran	Standar harga satuan yang tidak fleksibel terhadap letak geografis (distribusi) dapat menjadi salah satu penghambat proses penyelesaian pekerjaan di daerah terpencil.
3	Ketergantungan terhadap swadaya masyarakat	Program seperti BSPS sangat bergantung dari swadaya masyarakat penerima bantuan untuk penyelesaian pekerjaan tepat waktu dengan kondisi ekonomi yang rata-rata tidak menentu sehingga berisiko menyebabkan penurunan mutu hingga pekerjaan tidak selesai.
4	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana perkantoran yang masih belum memadai dalam mendukung kinerja sumber daya manusia di Balai dan Satuan Kerja.

1.2.4 Analisis Faktor Eksternal

Faktor eksternal (peluang dan tantangan) merupakan elemen-elemen yang berasal dari lingkungan di luar kendali Balai.

a. Peluang (*Opportunities*)

No.	Peluang (*Opportunities*) BP3KP Sulawesi II	Uraian
1	Optimalisasi Skema Pendanaan Non-APBN	Potensi besar pada APBD dan CSR melalui regulasi kolaborasi. Terutama di Wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki potensi yang tinggi dimana alokasi APBD cukup besar untuk penanganan rumah dalam capaian program 3 juta rumah. Terdapat pula potensi CSR yang besar dari beberapa sumber seperti BAZNAS dan Bank Sulteng.
2	Penyelesaian Korban Bencana yang belum Mendapatkan Bantuan	Penyelesaian pemberian bantuan untuk korban bencana terutama di Kota Palu dan Kabupaten Mamuju yang belum tersentuh bantuan sebagai momentum peningkatan pelayanan pemerintah.
3	Kemitraan Publik-Swasta/Badan Usaha	BP3KP Sulawesi II sebagai katalisator dalam mengubah mindset pemerintah daerah/swasta/badan usaha dari "peminta bantuan" menjadi "mitra kolaborasi" pembangunan untuk bersama-sama gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam perwujudan program 3 juta rumah.

b. Tantangan (*Threats*)

No.	Tantangan (*Threats*) BP3KP Sulawesi II	Uraian
1	Geopolitik Ekonomi	Kenaikan harga material atau hambatan distribusi di wilayah sulit yang melampaui standar harga pemerintah.
2	Risiko Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Ancaman cuaca seperti curah hujan tinggi yang sulit untuk di prediksi akan terus mengganggu jadwal konstruksi di masa depan, serta rawannya bencana longsor/gempa di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

3	Ketimpangan antara Usulan dan Kuota yang dapat Dilaksanakan	usulan di aplikasi SIBARU yang tidak segera ditangani dapat memicu ketidakpuasan sosial serta dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem layanan digital pemerintah.

1.2.5 Isu strategis BP3KP Sulawesi II (2025-2029)

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, Isu-isu strategis Renstra 2025–2029 adalah:

a. DTSEN yang sudah tidak sesuai dilapangan, dimana CPB penerima BSPS melalui DTSEN ternyata ada yang sudah melakukan renovasi rumah maupun ada beberapa yang tidak memenuhi syarat untuk berswadaya;
b. Lokasi akses CPB penerima bantuan BSPS sulit dijangkau namun masih menggunakan harga satuan pusat Kabupaten tanpa bisa memperhitungkan biaya distribusi ke lokasi;
c. Pemahaman beberapa pemerintah daerah mengenai program 3 juta rumah masih berharap semua dari APBN, sehingga kurangnya alokasi dana dalam kolaborasi pembangunan 3 juta rumah dari APBD maupun CSR;
d. Beberapa rumah penerima bantuan yang lambat progres pembangunannya di karenakan masalah tukang yang susah, kemudian curah hujan yang tinggi;
e. Masih banyaknya usulan masuk ke aplikasi sibaru namun belum dapat dilaksanakan;
f. Belum ada sarana dan prasarana infrastruktur yang menudukung aktifitas perkantoran terutama sarana gedung kantor;
g. Transformasi digital dalam pengembangan sistem pelayanan berbasis digital efisiensi dan transparansi dalam mendukung pelayanan zona integritas;

h. masih terdapat 600 KK korban bencana gempa dan likuifaksi yang belum mendapatkan bantuan hunian tetap oleh pemerintah di kota palu, sigi, dan donggala.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

Rencana Strategis 2025-2029 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman perencanaan bagi Balai pada lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Pertama **"Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegrasi secara kolaboratif di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat"**, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
2. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
3. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
4. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
5. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
6. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
7. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;

8. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
9. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
10. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

b. Kedua **"Peningkatan kualitas tata kelola pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II"**. dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II.

2.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

Sasaran strategi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II tentunya mengacu pada sasaran strategis Kementerian di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan. Berikut bagan Sasaran Program dan turunannya pada Sasaran Kegiatan hingga Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh BP3KP Sulawesi II.

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

IKSS-1: *Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi*
IKSS-4: *Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni*

Sasaran Program 1:
Meningkatnya Hunian Layak

Kegiatan 1
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

IKSK 1
Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni

IKSK 2
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

IKSK3
Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

Kegiatan 2
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

IKSK 1
Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU

IKSK2
Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum

IKSK3
Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal

IKSK4
Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau

Kegiatan 3
Penyediaan Rumah Layak Huni

Sasaran Kegiatan
Meningkanya ketersediaan layak huni

IKSK 1
Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas

IKSK2
Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru

IKSK3
Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman

Kegiatan 4
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan

IKSK 1
Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau

IKSS-2: *Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu*

Sasaran Program 2:
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh

Kegiatan 1
Penanganan Permukiman Kumuh

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

IKSK
Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

IKSS-3: *Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan*

Sasaran Program 3:
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Kegiatan 1
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman

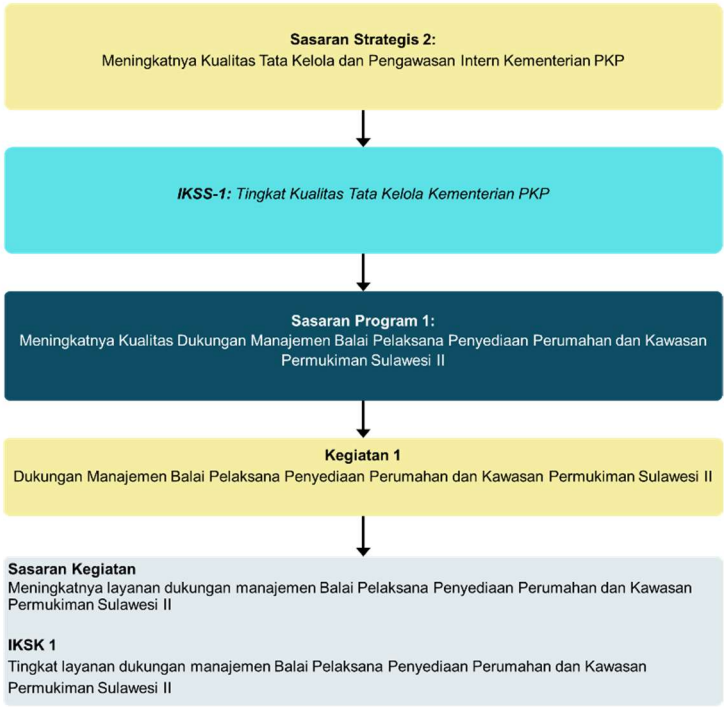
IKSK 1
Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel

IKSK 1
Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

IKSK 1
Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman



Gambar 11 Pohon Kinerja BP3KP Sulawesi II

Sebagaimana tergambar pada Pohon Kinerja, BP3KP Sulawesi II melaksanakan Sasaran Program dari 5 Unit Organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan Sekretariat Jenderal; hal ini menyebabkan terdapat 5 DIPA pada BP3KP Sulawesi II.

Secara rinci, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, hingga Indikator Kinerja BP3KP Sulawesi II disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11 Sasaran Program BP3KP Sulawesi II

No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKSK
1	Meningkatnya Hunian Layak	1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni 2. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II 3. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II
		2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana,	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan	1. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU

		Sarana, Utilitas Umum	di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	2. Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum 3. Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal 4. Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau
		3. Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan layak huni	1. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas 2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru 3. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman
		4. Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	1. Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1. Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

3	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman
			2. Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan public penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
			3. Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	Meningkatnya layanan dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	1. Tingkat layanan dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3KP Sulawesi II bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam menjalankan fungsinya, BP3KP Sulawesi II menjalankan pola koordinasi terpadu dengan berbagai unsur yang meliputi:

- Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
- Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan
- Sekretariat Jenderal.

Arah kebijakan BP3KP Sulawesi II mengacu pada strategi unit-unit organisasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian PKP 2025-2029. Arah Kebijakan Kementerian PKP sendiri adalah **menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas, dan fasilitasi pembiayaan perumahan**. Strategi ini menjadi acuan operasional dalam mendukung pencapaian target kementerian di wilayah kerja BP3KP Sulawesi II. Adapun strategi yang ditetapkan dan wajib diacu oleh BP3KP Sulawesi II meliputi:

a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
   1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan;
   2. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif;
   3. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu;
   4. Menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak.

b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
    1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan;
    2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif;
    3. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi;
    4. Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan;
c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
    1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan;
    2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/badan usaha milik negara serta mendorong pengembangan perumahan vertikal;
    3. Mendorong pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik;
    4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan;
    5. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
    6. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah;
    7. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital;
    8. Percepatan penghunian.
d. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
    1. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat;

2. Peningkatan kualitas tata Kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik;
3. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan di luar kredit pemilikan rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan serratus persen kredit pemilikan rumah, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, serta penguatan regulasi dan tata Kelola pembiayaan perumahan;
4. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain;
6. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan yang memerlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya.

e. Sekretariat Jenderal
1. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. Transformasi digital dan tata kelola;
3. Penguatan sumber daya manusia;
4. Penguatan sistem informasi dan data;
5. Peningkatan layanan dukungan manajemen;
6. Percepatan regulasi dan advokasi hukum;
7. Modernisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
8. Penguatan sistem dan tata kelola pengadaan barang dan jasa;
9. Penguatan komunikasi publik dan pelayanan publik;
10. Kolaborasi dan pendanaan alternatif.

Berdasarkan strategi dari masing-masing Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal maka Balai dapat mengambil strategi dari masing-masing Unit Organisasi yang sesuai/akan dilakukan pada BP3KP Sulawesi II:

1. Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat;
2. Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan penguatan ekosistem perumahan;
3. Penerapan teknologi baik dalam bidang konstruksi maupun transformasi digital dalam tata kelola dan sistem informasi;
4. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern di lingkungan BP3KP Sulawesi II;

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

Arah kebijakan dan Strategi Nasional didasarkan pada visi Presiden **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**, dan untuk sektor Perumahan yakni mengambil dari Misi Presiden Asta Cita 6, yaitu **"Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan"**.

Adapun arah kebijakan kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni **"Menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan"**.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II tidak luput dari arah kebijakan dan strategi Nasional maupun kementerian, dengan demikian untuk arah kebijakan dari BP3KP Sulawesi II sesuai dengan arah kebijakan dari kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni **"Menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat"**.

Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga merupakan turunan dari Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diuraikan dalam 4 strategi sebagai berikut:

a. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau

   BP3KP Sulawesi II merencanakan pelaksanaan strategi ini dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur hunian yang mencakup rumah susun, rumah khusus, serta rumah swadaya. Upaya tersebut juga akan dijalankan berdampingan dengan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas hunian swadaya dan penyediaan sanitasi yang layak bagi keluarga. Selain itu, strategi ini mencakup fasilitasi penyediaan lahan yang aman dan terjangkau untuk memastikan keberlanjutan akses perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai pelengkap, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diintegrasikan secara menyeluruh, baik pada hunian tapak maupun hunian vertikal, demi menciptakan lingkungan tempat tinggal yang berkualitas. peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau dapat pula dengan mengoptimalkan peran serta Pemerintah Daerah dan program CSR sebagai mitra kolaborasi dalam mewujudkan program 3 juta rumah.

b. Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif

   Penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan strategi seperti pendampingan dan penguatan Pemda dalam Menyusun dokumen-dokumen terkait dengan kumuh mulai dari dokumen penetapan berupa SK Kumuh , penyusunan dokumen perencanaan seperti RP3KP dan RP2KPKP, termasuk dengan proses pelaksanaan dan penataan Kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman mulai dari rumah, jalan, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran.

c. Penguatan layanan tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas

   Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan merupakan fondasi utama untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang sehat dan terpercaya. BP3KP Sulawesi II akan melakukan penerapannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, setiap tahapan proyek mulai dari perencanaan hingga serah terima unit dapat diawasi secara ketat untuk meminimalisir penyimpangan. Hal ini melibatkan digitalisasi keterbukaan data penyaluran bantuan, serta kolaborasi dengan Lembaga terkait seperti BPS untuk menjamin ketepatan sasaran dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Dengan tata kelola yang bersih, risiko kegagalan bangunan atau ketidaktepatan sasaran bantuan dapat dimitigasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik. Penerapannya mencakup pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta Sistem Manajemen Risiko.

d. Penguatan kualitas tata kelola

   Dalam menjalankan strategi ini BP3KP Sulawesi II yakni dengan melakukan penerapan reformasi birokrasi yang didukung oleh komitmen Pimpinan dalam mewujudkan lingkungan BP3KP Sulawesi II yang *Good Governance* dan Berintegritas.

3.3 Kerangka Kelembagaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II

Kerangka kelembagaan menjelaskan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

BP3KP Sulawesi II adalah unit pelaksana teknis di bawah garis komando dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Peratuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP Sulawesi II memiliki tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Dalam melaksanakan tugas BP3KP Sulawesi II juga memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;

h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

BP3KP Sulawesi II bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, sebagaimana ditunjukkan dalam struktur organisasi. Melalui peran koordinatif ini, BP3KP Sulawesi II menjadi penghubung penting antara kebijakan pusat dan implementasi daerah, sehingga penyelenggaraan kawasan permukiman dapat berlangsung lebih terarah, berkualitas, dan berkelanjutan.



Gambar 12 Diagram SOTK UPT

Sumber: Permen PKP No.1 Tahun 2025

Tugas masing-masing jabatan struktur BP3KP Sulawesi II yang berkedudukan sebagai UPT di bawah Ditjen Kawasan Permukiman terdiri dari:

a. Kepala Balai

   Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima asset;

b. Subbagian Umum dan Tata Usaha

   Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai;

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial dan melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir;

d. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut BP3KP Sulawesi II memiliki total SDM yang berjumlah 70 orang yang terbagi dalam 16 orang PNS, 47 orang PPPK, dan 7 orang PPPK Paruh Waktu yang ditugaskan dalam 3 Wilayah Kantor terpisah yakni:

a. 28 orang Pegawai (7 orang PNS, 20 orang PPPK, dan 1 orang PPPK Paruh Waktu) di Kantor Balai P3KP Sulawesi II;
b. 16 orang Pegawai (4 orang PNS, 10 orang PPPK, dan 2 orang PPPK Paruh Waktu) di Kantor Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
c. 26 orang Pegawai (5 orang PNS, 17 orang PPPK, dan 4 orang PPPK Paruh Waktu) di Kantor Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Barat.

Apabila melihat dari Peta Jabatan yang ada di BP3KP Sulawesi II untuk saat ini berdasarkan hasil penyusunan kebutuhan pegawai, yang

paling dibutuhkan adalah penambahan pegawai di Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan. Kekurangan Formasi Pegawai dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

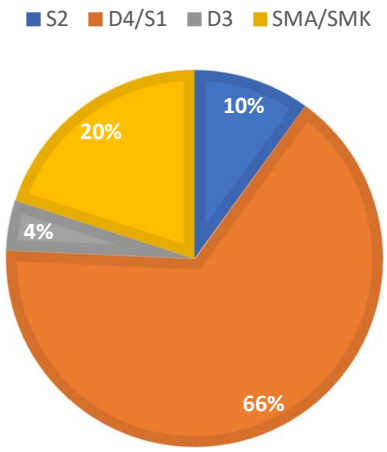
Tabel 12 Kebutuhan SDM BP3KP Sulawesi II

Kebutuhan Ideal Pegawai	228 orang
Pegawai Eksisting	97 orang
Kekurangan Formasi Pegawai	131 formasi jabatan

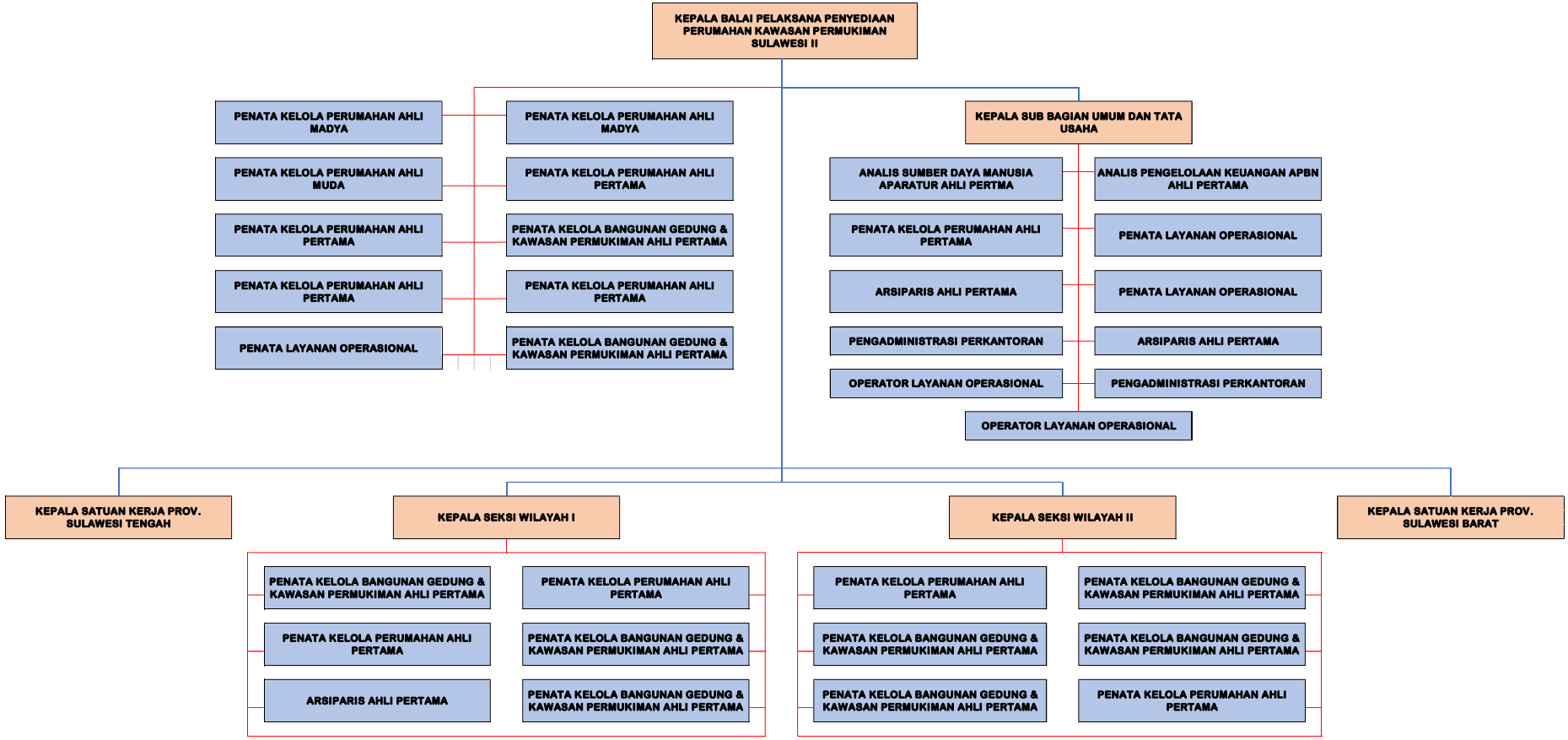
Adapun kualifikasi Pendidikan SDM di BP3KP Sulawesi II adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Kualifikasi Pendidikan SDM BP3KP Sulawesi II

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah Pegawai
		S2	D4/S1	D3	SMA/SMK	
1	Balai	4	19	-	5	28
2	Satker PKP Sulawesi Tengah	1	11	-	4	16
3	Satker PKP Sulawesi Barat	2	16	3	5	26
TOTAL		**7**	**46**	**3**	**14**	**70**



Adapun Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi II saat ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 13 Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi II

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Penyusunan target kinerja dalam Rencana Strategis BP3KP Sulawesi II merupakan langkah konkret dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategi Kementerian PKP untuk Menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

Tabel 14 Target Kinerja

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	2025-2029	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah	51	Laporan
	19	Dokumen
	51	Rekomendasi Kebijakan
	1	Kegiatan
Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		
Pembangunan PSU Rumah Tapak	1,770	unit
Pembangunan PSU Hunias Vertikal	-	unit
Pembangunan Rumah Swadaya	30,777	unit
Pembangunan Rumah Khusus	3,052	unit
Pembangunan Rumah Susun	368	unit
Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	20	hektar
DUKUNGAN MANAJEMEN		
Layanan Perkantoran	15	Layanan
Layanan Umum	51	Layanan
Jumlah Layanan Sarana Internal	15	Layanan
Jumlah Layanan Data dan Informasi	12	Layanan
Jumlah Layanan BMN	8	Layanan
Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	12	Layanan

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis program perumahan dan kawasan permukiman serta dukungan manajemen tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh BP3KP Sulawesi II, dibutuhkan

ketersediaan pendanaan pembangunan dari sumber APBN maupun non APBN dalam mewujudkan target 3 Juta Rumah.

Tabel 15 Kerangka Pendanaan

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	2025-2029 (dalam juta rupiah)
PENYEDIAAN AKSES RUMAH LAYAK HUNI	
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	37,387,212
Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	3,000,229,885
DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Layanan Perkantoran	326,166,066
Layanan Umum	4,354,016
Jumlah Layanan Sarana Internal	2,798,560
Jumlah Layanan Data dan Informasi	449,326
Jumlah Layanan BMN	422,743
Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	1,300,746

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II ini merupakan manifestasi dari komitmen kami dalam mewujudkan hunian yang layak dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen ini bukan sekadar landasan administratif, melainkan sebuah peta jalan operasional yang dirancang untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui sasaran strategis yang terukur, kami bertekad untuk memperkecil *Backlog* perumahan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara signifikan.

Keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. BP3KP Sulawesi II menyadari bahwa pembangunan infrastruktur permukiman tidak dapat berjalan secara parsial, diperlukan integrasi kebijakan yang harmonis dan dukungan pembiayaan yang inovatif agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran. Koordinasi lintas sektor akan menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan teknis maupun non-teknis di lapangan.

Selain aspek fisik pembangunan, fokus utama kami dalam periode ini adalah penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pemantauan yang transparan, kami berupaya memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata

bagi masyarakat. Profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan BP3KP Sulawesi II akan terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap dinamika kebutuhan perumahan di daerah.

Sebagai penutup, Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan integritas tinggi, serta menjadi acuan dalam pembuatan dokumen-dokumen dalam evaluasi pelaksaaan renstra yakni perjanjian kinerja, rencana aksi, laporan triwulan dan laporan tahunan, serta dokumen hasil reviu dan evaluasi kinerja. Kami optimis bahwa dengan kerja keras dan dedikasi yang berkelanjutan, BP3KP Sulawesi II mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berjati diri. Semoga segala upaya yang kita rencanakan ini mendapatkan kemudahan dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja BP3KP Sulawesi II.

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA PENDANAAN

Tabel 16 Matriks Kinerja Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	*-2*	*-3*		*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*	*-15*
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II															
	OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	**5**	50,000	175,000	184,450	194,410	204,908	**808,769**
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen		-	1	1	1	1	**4**	-	60,000	63,240	66,655	70,254	**260,149**
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan		3	-	-	-	-	**3**	145,789	-	-	-	-	**145,789**
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan		-	1	1	1	1	**4**	-	32,632	34,394	36,251	38,208	**141,485**
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan		1	-	-	-	-	**1**	253,210	-	-	-	-	**253,210**
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	**4**	-	819,657	863,918	910,570	959,741	**3,553,886**
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	**4**	-	298,134	314,233	331,202	349,087	**1,292,656**
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		2	3	3	3	3	**14**	248,157	999,978	1,053,977	1,110,892	1,170,880	**4,583,883**
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	**4**	-	175,000	184,450	194,410	204,908	**758,769**
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	3	3	3	3	**12**	-	280,000	295,120	311,056	327,854	**1,214,030**
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II															
	OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		134	409	409	409	409	**1,770**	9,514,000	5,994,686	6,233,518	6,520,117	6,902,248	**35,164,569**
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen		-	-	1	1	1	**3**	-	-	88,900	93,701	98,760	**281,361**
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	**4**	-	966,451	1,018,639	1,073,646	1,131,623	**4,190,359**
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	**4**	-	90,000	94,860	99,982	105,381	**390,224**
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	**4**	-	95,000	100,130	105,537	111,236	**411,903**

KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																
	OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		161	7,654	7,654	7,654	7,654	**30,777**	5,474,000	185,284,205	194,526,410	203,768,615	213,010,820	**802,064,050**
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit		-	763	763	763	763	**3,052**	-	328,810,749	338,658,788	354,748,911	370,839,034	**1,393,057,482**
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		16	88	88	88	88	**368**	32,000,000	165,662,184	167,050,400	174,627,200	182,204,000	**721,543,784**
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan		-	1	1	1	1	**4**	-	88,500	93,279	98,316	103,625	383,720
	5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan		3	-	-	-	-	**3**	13,210	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,210**
	6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	**4**	-	291,073	306,791	323,358	340,819	**1,262,041**
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	**4**	-	180,000	189,720	199,965	210,763	**780,448**
	8	Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	**4**	-	330,000	347,820	366,602	386,399	**1,430,821**
	9	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan		3	-	-	-	-	**3**	2,435,226	-	-	-	-	**2,435,226**
	10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	**4**	-	95,000	100,130	105,537	111,236	**411,903**
	11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	**4**	-	1,948,100	2,053,297	2,164,175	2,281,041	**8,446,614**
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan																
	OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	**4**	-	80,000	84,320	88,873	93,672	**346,866**
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu															
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**																
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
	OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar		-	-	-	-	20	**20**	-	-	-	-	48400000	**48,400,000**
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan															
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**																
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN: **Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman**																
	OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan		-	1	1	1	1	**4**	-	52,600	75,000	100,000	125,000	**352,600**
SASARAN KEGIATAN: **Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel**																
	OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	**5**	129,232	182,150	200,365	220,410	242,451	**974,608**

SASARAN KEGIATAN: **Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**																	
	OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	**5**	174,233	225,000	247,500	272,250	299,475	**1,218,458**
	2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	**4**	-	225,000	247,500	272,250	299,475	**1,044,225**
SASARAN STRATEGIS 2: **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**																	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																	
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II**																	
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II																	
SASARAN KEGIATAN: **Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II**																	
	OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan		3	3	3	3	3	**15**	25,482,844	69,762,065	73,250,169	76,912,677	80,758,311	**326,166,066**
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan		3	3	3	3	3	**15**	41,640	136,200	143,010	150,161	157,669	**628,679**
	3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan		-	3	3	3	3	**12**	-	239,700	252,644	266,287	280,666	**1,039,296**
	4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	3	3	3	3	**12**	-	364,500	384,183	404,929	426,795	**1,580,407**
	5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	3	3	3	3	**12**	-	255,000	268,770	283,284	298,581	**1,105,634**
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan		3	3	3	3	3	**15**	60,010	635,376	667,145	700,502	735,527	**2,798,560**
	7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	**4**	-	14,500	15,283	16,108	16,978	**62,869**
	8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	1	1	1	1	**4**	-	14,131	14,894	15,698	16,546	**61,269**
	9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	**4**	-	75,000	79,050	83,319	87,818	**325,187**
	10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	**4**	-	22,500	23,715	24,996	26,345	**97,556**
	11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	**4**	-	75,000	79,050	83,319	87,818	**325,187**
	12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	3	3	3	3	**12**	-	300,000	316,200	333,275	351,272	**1,300,746**

LAMPIRAN II

METODE PERHITUNGAN

Tabel 17 Metode Perhitungan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1: **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan**					
SASARAN PROGRAM 1: **Meningkatnya Hunian Layak**					
Kegiatan 1: **Penyelenggaraan Sistem dan Strategi**					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	**IKSK 1** Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	**OK 1** Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 3 laporan	Non Kumulatif	Internal

		OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2027: - kegiatan 2029: - kegiatan 2026: - kegiatan 2028: - kegiatan Total : 1 kegiatan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: 3 laporan 2029: 3 laporan 2026: 3 laporan 2028: 3 laporan Total : 14 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

				OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 3 laporan 2029: 3 laporan 2026: 3 laporan 2028: 3 laporan Total : 12 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: **Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum**								
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	**IKSK 1**	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	**OK 1**	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 134 unit 2027: 409 unit 2029: 409 unit 2026: 409 unit 2028: 409 unit Total : 1,770 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	**OK 2**	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: - unit 2029: - unit 2026: - unit 2028: - unit Total : - unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	**OK 3**	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: - dokumen 2028: 1 dokumen Total : 3 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal

				OK 6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: **Penyediaan Rumah Layak Huni**								
SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	**IKSK 1**	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	**OK 1**	Jumlah unit rumah swadaya *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 211 unit 2027: 7,654 unit 2029: 7,654 unit 2026: 7,654 unit 2028: 7,654 unit Total : 30,827 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	**OK 2**	Jumlah rumah khusus yang terbangun *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 763 unit 2029: 763 unit 2026: 763 unit 2028: 763 unit Total : 3,052 unit	Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 32 unit 2027: 88 unit 2029: 88 unit 2026: 88 unit 2028: 88 unit Total : 384 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	**OK 4**	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 3 laporan	Non Kumulatif	Internal

		OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 3 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

Kegiatan 4: **Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**								
SK 1	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	**IKSK 1**	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	**OK 1**	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: **Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**								
Kegiatan 1: **Penanganan Permukiman Kumuh**								
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	**IKSK 1**	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	**OK 1**	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: ... Ha 2027: ... Ha 2029: 20 Ha 2026: ... Ha 2028: ... Ha Total: 20 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: **Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**								
Kegiatan 1: **Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	**IKSK 1**	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	**OK 1**	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 Laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: **Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel**								
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	**IKSK 1**	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	**OK 1**	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

Kegiatan 3: **Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**								
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	**IKSK 1**	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	**OK 1**	Jumlah penerapan manajemen risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
SASARAN STRATEGIS 2: **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
SASARAN PROGRAM 1: **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II**								
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II								
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	**IKSK 1**	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	**OK 1**	Jumlah Layanan Perkantoran *(Sekretariat Jenderal)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Layanan Umum *(Sekretariat Jenderal)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal

		OK 3	Jumlah Layanan Umum *(Ditjen Kawasan Permukiman)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4	Jumlah Layanan Umum *(Ditjen Perumahan Perdesaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5	Jumlah Layanan Umum *(Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal *(Sekretariat Jenderal)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi *(Ditjen Kawasan Permukiman)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi *(Ditjen Perumahan Perdesaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal

		OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi *(Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10	Jumlah Layanan BMN *(Ditjen Kawasan Permukiman)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11	Jumlah Layanan BMN *(Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja *(Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal